



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU PAMBUDI
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 68250

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.055.842.152**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/182 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 673.947.750
2. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 483.720.563
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 478.285.500
4. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/162 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 652.207.500
5. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 298.928.438
6. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 84.243.469
7. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 384.508.932

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 447.850.000**

1. LAINNYA, SPESIALIS SEPEDA GUNUNG Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000



4. LAINNYA, GIANT SEPEDA GUNUNG Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
5. MOTOR, YAMAHA 125 Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
6. LAINNYA, UNITED SEPEDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000
7. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 432.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	394.868.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	28.829.795
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	16.817.269.319
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	20.744.659.266

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 20.744.659.266

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.